



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER  
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, terdapat perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer kepada Desa, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Bab I Huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - A. ALOKASI DANA DESA
    1. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
    2. ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK.
    3. Pengalokasian ADD setiap Desa guna memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
      - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
      - b. kebutuhan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
      - c. kebutuhan biaya operasional dan insentif Ketua RT dan RW;
      - d. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja Kepala Dusun;
      - e. Kebutuhan Operasional Pemerintah Desa.
    4. Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan kinerja bagi Kepala Dusun (Kadus) sebagaimana dimaksud angka 3 huruf d Keputusan ini diatur sebagai berikut:
      - a. Kadus yang wilayahnya telah memenuhi syarat (MS) sebuah dusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (2 RW, 6 RT, 240 KK) maka Kadus tersebut memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan kinerja;

- b. Kadus yang wilayahnya tidak memenuhi syarat (TMS) sebuah dusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (2 RW, 6 RT, 240 KK) hanya memperoleh penghasilan tetap.
- c. Desa yang memiliki Kadus sebagaimana disebut huruf b paling banyak 6 (enam) orang.
- d. Desa yang mempunyai Kadus lebih dari 6 (enam) serta terdapat kekosongan Kadus yang berstatus TMS maka Kadus yang kosong tersebut mengurangi alokasi jumlah Kadus dalam perhitungan ADD;
- e. Desa yang memiliki jumlah Kadus setelah dikurangi jumlah Kadus kosong masih memiliki lebih dari 6 (enam) Kadus berstatus TMS, maka kelebihanannya diperlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Desa dengan kelebihan jumlah Kadus TMS sampai dengan 3 (tiga), penghasilan tetap dan tunjangan kinerja Kadus dapat diambilkan dari sumber dana lain selain Dana Desa;
  - 2) Desa dengan kelebihan Kadus TMS dengan jumlah 4 (empat), memperoleh alokasi penghasilan tetap sebanyak 1 (satu) Kadus;

- 3) Desa dengan kelebihan Kadus TMS dengan jumlah 5 (lima) memperoleh alokasi penghasilan tetap sebanyak 2 (dua) Kadus;
  - 4) Desa dengan kelebihan Kadus TMS dengan jumlah 6 (enam), memperoleh alokasi penghasilan tetap sebanyak 3 (tiga) Kadus; dan
  - 5) Desa dengan kelebihan Kadus TMS dengan jumlah 7 (tujuh) atau lebih, memperoleh alokasi penghasilan tetap sebanyak 4 (empat) Kadus.
5. ADD dibagi secara merata dan berkeadilan setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Angka 3, dan dialokasikan berdasarkan :
    - a. Alokasi Dasar;
    - b. Alokasi Afirmasi;
    - c. Alokasi Kinerja, dan
    - d. Alokasi Formula.
  6. Pagu Alokasi Dasar (AD) sebagaimana dimaksud Angka 5 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen);
  7. Pagu Alokasi Afirmasi (AA) sebagaimana dimaksud Angka 5 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan Klasifikasi Desa yang dihitung dari Indeks Desa Membangun (IDM); dan
  8. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud Angka 5 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) kepada Desa dengan kinerja terbaik.
  9. Pagu Alokasi Formula (AF) sebagaimana dimaksud Angka 5 huruf d dihitung sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) dibagi berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel sebagai berikut:
    - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
    - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

10. Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten
AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa

2. Ketentuan Lampiran I Bab II Huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### A. ALOKASI DANA DESA

1. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), pengajuan pencairan paling lambat bulan Maret;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), pengajuan pencairan pada awal Mei dan paling lambat minggu ketiga bulan Mei; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), pengajuan pencairan pada awal September dan paling lambat minggu ketiga bulan September.
3. Pengajuan insentif dan operasional RT/RW dipisahkan dari pengajuan ADD per tahap.
4. Apabila ada perubahan pagu ADD tahun berjalan, maka Desa berhak mengajukan pencairan ADD perubahan pada awal bulan November sampai dengan minggu ketiga bulan November.
5. Penghasilan Tetap, Tunjangan Kinerja, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD merupakan belanja wajib setiap bulan dan diberikan 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) tahun.
6. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Tahap I
    - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan;
    - 2) Hasil Evaluasi APBDes oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
    - 3) Peraturan Desa tentang RKP Tahun Anggaran berjalan;
    - 4) Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai bulan Desember tahun sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan desa;
    - 5) Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I;
    - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan ADD; dan



- b. Permohonan tahap II :
  - 1) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - 2) Laporan realisasi tahap I sesuai aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
  - 3) Rencana Penggunaan Dana ADD tahap II.
- c. Permohonan Tahap III :
  - 1) Laporan realisasi tahap II sesuai aplikasi Sistem Keuangan Desa;
  - 2) Rencana Penggunaan Dana ADD tahap III.
- d. Permohonan Pencairan ADD untuk insentif dan Operasional RT/RW dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana.
- e. Permohonan ADD Perubahan :
  - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan; dan
  - 2) Rencana Penggunaan Dana ADD perubahan.
7. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6, diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, selanjutnya semua berkas dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat.
8. Apabila dalam proses verifikasi berkas administrasi penyaluran ADD tidak lengkap, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
9. Setelah menerima permohonan pencairan ADD, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyalurkan ADD ke rekening Kas Desa dengan melampirkan rekapitulasi permohonan penyaluran ADD.
10. Apabila terdapat penambahan pagu anggaran ADD setelah Perubahan APBD, maka penyaluran penambahan ADD tersebut dilakukan 1 (satu) kali setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

3. Ketentuan Lampiran III diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 Maret 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

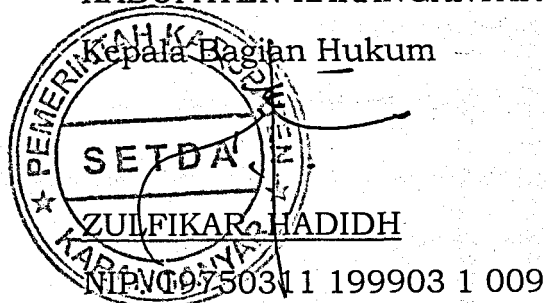
Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
 PENGELOLAAN DANA TRANSFER  
 KEPADA DESA

PENETAPAN BESARAN DANA DESA PER TAHAP KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Pertahapan		
						Alokasi Formula		Dana Desa Tahap I 40%	Dana Desa Tahap II 40%	Dana Desa Tahap III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jatipuro	Ngepungsari	641,574,000	-	288,153,000	246,128,000	1,175,855,000	470,342,000	470,342,000	235,171,000
2	Jatipuro	Jatipurwo	641,574,000	-	-	306,518,000	948,092,000	379,236,800	379,236,800	189,618,400
3	Jatipuro	Jatipuro	641,574,000	-	-	222,695,000	864,269,000	345,707,600	345,707,600	172,853,800
4	Jatipuro	Jatisobo	641,574,000	-	-	314,002,000	955,576,000	382,230,400	382,230,400	191,115,200
5	Jatipuro	Jatiwarno	641,574,000	171,591,000	-	350,172,000	1,163,337,000	465,334,800	465,334,800	232,667,400
6	Jatipuro	Jatimulyo	641,574,000	-	288,153,000	357,768,000	1,287,495,000	514,998,000	514,998,000	257,499,000
7	Jatipuro	Jatisuko	641,574,000	171,591,000	-	261,498,000	1,074,663,000	429,865,200	429,865,200	214,932,600
8	Jatipuro	Jatiharjo	641,574,000	-	-	274,406,000	915,980,000	366,392,000	366,392,000	183,196,000
9	Jatipuro	Jatikuwung	641,574,000	-	-	295,576,000	937,150,000	374,860,000	374,860,000	187,430,000
10	Jatipuro	Jatiroyo	641,574,000	-	-	424,991,000	1,066,565,000	426,626,000	426,626,000	213,313,000
11	Jatiyoso	Jatisawit	641,574,000	-	-	365,056,000	1,006,630,000	402,652,000	402,652,000	201,326,000
12	Jatiyoso	Petung	641,574,000	-	-	505,123,000	1,146,697,000	458,678,800	458,678,800	229,339,400
13	Jatiyoso	Wonokeling	641,574,000	-	-	549,549,000	1,191,123,000	476,449,200	476,449,200	238,224,600
14	Jatiyoso	Jatiyoso	641,574,000	-	-	531,407,000	1,172,981,000	469,192,400	469,192,400	234,596,200
15	Jatiyoso	Tlobo	641,574,000	-	-	408,500,000	1,050,074,000	420,029,600	420,029,600	210,014,800
16	Jatiyoso	Wonorejo	721,575,000	-	-	744,007,000	1,465,582,000	586,232,800	586,232,800	293,116,400
17	Jatiyoso	Beruk	641,574,000	-	-	467,824,000	1,109,398,000	443,759,200	443,759,200	221,879,600
18	Jatiyoso	Karangsari	721,575,000	-	-	487,957,000	1,209,532,000	483,812,800	483,812,800	241,906,400
19	Jatiyoso	Wukirsawit	721,575,000	-	-	590,872,000	1,312,447,000	524,978,800	524,978,800	262,489,400
20	Jumapolo	Paseban	641,574,000	-	-	400,033,000	1,041,607,000	416,642,800	416,642,800	208,321,400
21	Jumapolo	Lemahbang	641,574,000	-	-	354,220,000	995,794,000	398,317,600	398,317,600	199,158,800
22	Jumapolo	Jatirejo	641,574,000	-	-	270,292,000	911,866,000	364,746,400	364,746,400	182,373,200
23	Jumapolo	Kwangsan	641,574,000	-	-	406,060,000	1,047,634,000	419,053,600	419,053,600	209,526,800
24	Jumapolo	Karangbangun	641,574,000	-	-	252,634,000	894,208,000	357,683,200	357,683,200	178,841,600
25	Jumapolo	Ploso	641,574,000	-	-	349,930,000	991,504,000	396,601,600	396,601,600	198,300,800
26	Jumapolo	Giriwondo	641,574,000	-	-	321,664,000	963,238,000	385,295,200	385,295,200	192,647,600
27	Jumapolo	Kadipiro	641,574,000	-	-	372,572,000	1,014,146,000	405,658,400	405,658,400	202,829,200
28	Jumapolo	Jumantoro	641,574,000	-	-	453,493,000	1,095,067,000	438,026,800	438,026,800	219,013,400
29	Jumapolo	Kedawung	641,574,000	-	-	319,812,000	961,386,000	384,554,400	384,554,400	192,277,200
30	Jumapolo	Jumapolo	721,575,000	-	-	298,706,000	1,020,281,000	408,112,400	408,112,400	204,056,200
31	Jumapolo	Bakalan	641,574,000	-	-	359,984,000	1,001,558,000	400,623,200	400,623,200	200,311,600
32	Jumantono	Sedayu	721,575,000	-	-	468,799,000	1,190,374,000	476,149,600	476,149,600	238,074,800
33	Jumantono	Kebak	641,574,000	-	-	476,237,000	1,117,811,000	447,124,400	447,124,400	223,562,200
34	Jumantono	Gemantar	641,574,000	-	-	417,077,000	1,058,651,000	423,460,400	423,460,400	211,730,200
35	Jumantono	Tunggulrejo	721,575,000	-	-	368,158,000	1,089,733,000	435,893,200	435,893,200	217,946,600
36	Jumantono	Genengan	641,574,000	-	-	363,737,000	1,005,311,000	402,124,400	402,124,400	201,062,200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Pertahanan		
						Alokasi Formula		Dana Desa Tahap I 40%	Dana Desa Tahap II 40%	Dana Desa Tahap III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Jumantono	Ngunut	641,574,000	-	288,153,000	296,522,000	1,226,249,000	490,499,600	490,499,600	245,249,800
38	Jumantono	Tugu	721,575,000	-	-	494,004,000	1,215,579,000	486,231,600	486,231,600	243,115,800
39	Jumantono	Sukosari	641,574,000	-	-	281,585,000	923,159,000	369,263,600	369,263,600	184,631,800
40	Jumantono	Sambirejo	641,574,000	-	-	352,349,000	993,923,000	397,569,200	397,569,200	198,784,600
41	Jumantono	Blorong	641,574,000	-	-	413,674,000	1,055,248,000	422,099,200	422,099,200	211,049,600
42	Jumantono	Sringin	721,575,000	-	-	451,423,000	1,172,998,000	469,199,200	469,199,200	234,599,600
43	Matesih	Ngadiluwih	721,575,000	-	-	230,069,000	951,644,000	380,657,600	380,657,600	190,328,800
44	Matesih	Dawung	641,574,000	-	-	248,838,000	890,412,000	356,164,800	356,164,800	178,082,400
45	Matesih	Matesih	721,575,000	-	-	214,995,000	936,570,000	374,628,000	374,628,000	187,314,000
46	Matesih	Karangbangun	721,575,000	-	-	353,544,000	1,075,119,000	430,047,600	430,047,600	215,023,800
47	Matesih	Koripan	641,574,000	-	-	366,219,000	1,007,793,000	403,117,200	403,117,200	201,558,600
48	Matesih	Girilayu	641,574,000	-	-	344,542,000	986,116,000	394,446,400	394,446,400	197,223,200
49	Matesih	Pablengan	721,575,000	-	-	403,652,000	1,125,227,000	450,090,800	450,090,800	225,045,400
50	Matesih	Plosorejo	641,574,000	-	-	259,926,000	901,500,000	360,600,000	360,600,000	180,300,000
51	Matesih	Gantiwarno	641,574,000	-	-	168,810,000	810,384,000	324,153,600	324,153,600	162,076,800
52	Tawangmangu	Gondosuli	641,574,000	-	-	626,282,000	1,267,856,000	507,142,400	507,142,400	253,571,200
53	Tawangmangu	Sepanjang	641,574,000	-	-	391,758,000	1,033,332,000	413,332,800	413,332,800	206,666,400
54	Tawangmangu	Bandardawung	641,574,000	-	-	308,982,000	950,556,000	380,222,400	380,222,400	190,111,200
55	Tawangmangu	Karanglo	641,574,000	-	-	236,542,000	878,116,000	351,246,400	351,246,400	175,623,200
56	Tawangmangu	Nglebak	721,575,000	-	-	243,096,000	964,671,000	385,868,400	385,868,400	192,934,200
57	Tawangmangu	Plumbon	641,574,000	-	-	339,161,000	980,735,000	392,294,000	392,294,000	196,147,000
58	Tawangmangu	Tengklik	641,574,000	-	-	587,746,000	1,229,320,000	491,728,000	491,728,000	245,864,000
59	Ngargoyoso	Puntukrejo	641,574,000	-	-	310,798,000	952,372,000	380,948,800	380,948,800	190,474,400
60	Ngargoyoso	Berjo	721,575,000	-	-	406,384,000	1,127,959,000	451,183,600	451,183,600	225,591,800
61	Ngargoyoso	Girimulyo	641,574,000	-	-	322,315,000	963,889,000	385,555,600	385,555,600	192,777,800
62	Ngargoyoso	Segorogunung	641,574,000	-	-	382,054,000	1,023,628,000	409,451,200	409,451,200	204,725,600
63	Ngargoyoso	Kemuning	721,575,000	-	288,153,000	427,969,000	1,437,697,000	575,078,800	575,078,800	287,539,400
64	Ngargoyoso	Nglepok	641,574,000	-	-	397,773,000	1,039,347,000	415,738,800	415,738,800	207,869,400
65	Ngargoyoso	Dukuh	641,574,000	-	288,153,000	300,619,000	1,230,346,000	492,138,400	492,138,400	246,069,200
66	Ngargoyoso	Jatirejo	641,574,000	-	-	275,400,000	916,974,000	366,789,600	366,789,600	183,394,800
67	Ngargoyoso	Ngargoyoso	641,574,000	-	288,153,000	512,651,000	1,442,378,000	576,951,200	576,951,200	288,475,600
68	Karangpandan	Bangsri	721,575,000	-	-	300,977,000	1,022,552,000	409,020,800	409,020,800	204,510,400
69	Karangpandan	Ngemplak	641,574,000	-	-	446,296,000	1,087,870,000	435,148,000	435,148,000	217,574,000
70	Karangpandan	Doplang	641,574,000	-	-	199,716,000	841,290,000	336,516,000	336,516,000	168,258,000
71	Karangpandan	Gerdu	641,574,000	-	-	362,299,000	1,003,873,000	401,549,200	401,549,200	200,774,600
72	Karangpandan	Karang	641,574,000	-	-	304,127,000	945,701,000	378,280,400	378,280,400	189,140,200
73	Karangpandan	Salam	641,574,000	-	-	330,225,000	971,799,000	388,719,600	388,719,600	194,359,800
74	Karangpandan	Karangpandan	721,575,000	-	-	174,201,000	895,776,000	358,310,400	358,310,400	179,155,200
75	Karangpandan	Tohkuning	721,575,000	-	-	396,678,000	1,118,253,000	447,301,200	447,301,200	223,650,600
76	Karangpandan	Gondangmanis	641,574,000	-	-	380,402,000	1,021,976,000	408,790,400	408,790,400	204,395,200
77	Karangpandan	Dayu	641,574,000	-	-	226,897,000	868,471,000	347,388,400	347,388,400	173,694,200
78	Karangpandan	Harjosari	641,574,000	-	-	235,863,000	877,437,000	350,974,800	350,974,800	175,487,400
79	Tasikmadu	Buran	721,575,000	-	-	203,717,000	925,292,000	370,116,800	370,116,800	185,058,400
80	Tasikmadu	Papahan	721,575,000	-	-	141,518,000	863,093,000	517,855,800	345,237,200	Desa Mandiri 60% dan 40 %
81	Tasikmadu	Ngijo	721,575,000	-	-	183,671,000	905,246,000	362,098,400	362,098,400	181,049,200
82	Tasikmadu	Gaum	721,575,000	-	-	300,033,000	1,021,608,000	408,643,200	408,643,200	204,321,600
83	Tasikmadu	Suruh	721,575,000	-	-	227,221,000	948,796,000	379,518,400	379,518,400	189,759,200
84	Tasikmadu	Pandeyan	721,575,000	-	-	214,091,000	935,666,000	374,266,400	374,266,400	187,133,200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Pertahapan		
						Alokasi Formula		Dana Desa Tahap I 40%	Dana Desa Tahap II 40%	Dana Desa Tahap III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
85	Tasikmadu	Karangmojo	721,575,000	-	-	271,911,000	993,486,000	397,394,400	397,394,400	198,697,200
86	Tasikmadu	Kaling	721,575,000	-	288,153,000	288,507,000	1,298,235,000	519,294,000	519,294,000	259,647,000
87	Tasikmadu	Wonolopo	641,574,000	-	-	279,654,000	921,228,000	368,491,200	368,491,200	184,245,600
88	Tasikmadu	Kalijirak	721,575,000	-	288,153,000	456,152,000	1,465,880,000	586,352,000	586,352,000	293,176,000
89	Jaten	Suruhkalang	721,575,000	-	-	273,278,000	994,853,000	397,941,200	397,941,200	198,970,600
90	Jaten	Jati	721,575,000	-	-	215,611,000	937,186,000	374,874,400	374,874,400	187,437,200
91	Jaten	Jaten	801,576,000	-	288,153,000	236,822,000	1,326,551,000	795,930,600	530,620,400	Desa Mandiri 60% dan 40 %
92	Jaten	Dagen	721,575,000	-	-	136,753,000	858,328,000	343,331,200	343,331,200	171,665,600
93	Jaten	Ngringo	801,576,000	-	-	305,812,000	1,107,388,000	664,432,800	442,955,200	Desa Mandiri 60% dan 40 %
94	Jaten	Jetis	721,575,000	-	288,153,000	241,302,000	1,251,030,000	500,412,000	500,412,000	250,206,000
95	Jaten	Sroyo	801,576,000	-	288,153,000	260,490,000	1,350,219,000	810,131,400	540,087,600	Desa Mandiri 60% dan 40 %
96	Jaten	Brujul	721,575,000	-	-	209,933,000	931,508,000	372,603,200	372,603,200	186,301,600
97	Colomadu	Ngasem	721,575,000	-	-	199,982,000	921,557,000	368,622,800	368,622,800	184,311,400
98	Colomadu	Bolon	721,575,000	-	-	211,626,000	933,201,000	373,280,400	373,280,400	186,640,200
99	Colomadu	Malangjiwan	801,576,000	-	-	190,397,000	991,973,000	396,789,200	396,789,200	198,394,600
100	Colomadu	Paulan	641,574,000	-	-	101,803,000	743,381,000	297,352,400	297,352,400	148,676,200
101	Colomadu	Gajahan	641,574,000	-	-	128,135,000	769,709,000	307,883,600	307,883,600	153,941,800
102	Colomadu	Blulukan	721,575,000	-	-	153,988,000	875,563,000	350,225,200	350,225,200	175,112,600
103	Colomadu	Gawanan	721,575,000	-	-	181,660,000	903,235,000	361,294,000	361,294,000	180,647,000
104	Colomadu	Gedongan	721,575,000	-	-	318,128,000	1,039,703,000	415,881,200	415,881,200	207,940,600
105	Colomadu	Tohudan	721,575,000	-	-	189,793,000	911,368,000	364,547,200	364,547,200	182,273,600
106	Colomadu	Baturan	721,575,000	-	288,153,000	193,386,000	1,203,114,000	481,245,600	481,245,600	240,622,800
107	Colomadu	Klodran	721,575,000	-	-	169,892,000	891,467,000	356,586,800	356,586,800	178,293,400
108	Gondangrejo	Wonorejo	801,576,000	-	-	356,648,000	1,158,224,000	463,289,600	463,289,600	231,644,800
109	Gondangrejo	Plesungan	721,575,000	-	-	356,186,000	1,077,761,000	431,104,400	431,104,400	215,552,200
110	Gondangrejo	Jatikuwung	721,575,000	-	-	297,471,000	1,019,046,000	407,618,400	407,618,400	203,809,200
111	Gondangrejo	Selokaton	721,575,000	-	-	287,736,000	1,009,311,000	403,724,400	403,724,400	201,862,200
112	Gondangrejo	Bulurejo	721,575,000	-	-	261,623,000	983,198,000	393,279,200	393,279,200	196,639,600
113	Gondangrejo	Rejosari	641,574,000	-	-	280,222,000	921,796,000	368,718,400	368,718,400	184,359,200
114	Gondangrejo	Jeruksawit	721,575,000	-	-	386,434,000	1,108,009,000	443,203,600	443,203,600	221,601,800
115	Gondangrejo	Karangturi	641,574,000	-	-	304,787,000	946,361,000	378,544,400	378,544,400	189,272,200
116	Gondangrejo	Kragan	641,574,000	-	-	240,035,000	881,609,000	352,643,600	352,643,600	176,321,800
117	Gondangrejo	Wonosari	641,574,000	-	-	289,151,000	930,725,000	372,290,000	372,290,000	186,145,000
118	Gondangrejo	Dayu	641,574,000	-	-	403,643,000	1,045,217,000	418,086,800	418,086,800	209,043,400
119	Gondangrejo	Tuban	721,575,000	-	-	195,054,000	916,629,000	366,651,600	366,651,600	183,325,800
120	Gondangrejo	Krendowahono	641,574,000	-	-	281,646,000	923,220,000	369,288,000	369,288,000	184,644,000
121	Kebakkramat	Banjarharjo	641,574,000	-	-	468,903,000	1,110,477,000	444,190,800	444,190,800	222,095,400
122	Kebakkramat	Alastuwo	721,575,000	-	-	402,376,000	1,123,951,000	449,580,400	449,580,400	224,790,200
123	Kebakkramat	Macanan	721,575,000	-	-	263,735,000	985,310,000	394,124,000	394,124,000	197,062,000
124	Kebakkramat	Nangsri	721,575,000	-	-	249,341,000	970,916,000	388,366,400	388,366,400	194,183,200
125	Kebakkramat	Kemiri	721,575,000	-	-	237,586,000	959,161,000	383,664,400	383,664,400	191,832,200
126	Kebakkramat	Kebak	721,575,000	-	-	199,561,000	921,136,000	368,454,400	368,454,400	184,227,200
127	Kebakkramat	Waru	721,575,000	-	-	296,128,000	1,017,703,000	407,081,200	407,081,200	203,540,600
128	Kebakkramat	Pulosari	721,575,000	-	-	245,391,000	966,966,000	386,786,400	386,786,400	193,393,200
129	Kebakkramat	Malanggaten	721,575,000	-	-	296,368,000	1,017,943,000	407,177,200	407,177,200	203,588,600
130	Kebakkramat	Kaliwuluh	721,575,000	-	-	380,364,000	1,101,939,000	440,775,600	440,775,600	220,387,800
131	Mojogedang	Sewurejo	721,575,000	-	-	696,328,000	1,417,903,000	567,161,200	567,161,200	283,580,600
132	Mojogedang	Ngadirejo	721,575,000	-	-	668,745,000	1,390,320,000	556,128,000	556,128,000	278,064,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Pertahapan		
						Alokasi Formula		Dana Desa Tahap I 40%	Dana Desa Tahap II 40%	Dana Desa Tahap III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
133	Mojogedang	Mojogedang	641,574,000	-	-	263,084,000	904,658,000	542,794,800	361,863,200	Desa Mandiri 60% dan 40 %
134	Mojogedang	Pojok	721,575,000	-	-	547,906,000	1,269,481,000	507,792,400	507,792,400	253,896,200
135	Mojogedang	Mojoroto	641,574,000	-	-	288,427,000	930,001,000	372,000,400	372,000,400	186,000,200
136	Mojogedang	Kaliboto	721,575,000	-	-	534,645,000	1,256,220,000	502,488,000	502,488,000	251,244,000
137	Mojogedang	Buntar	641,574,000	-	-	387,851,000	1,029,425,000	411,770,000	411,770,000	205,885,000
138	Mojogedang	Gebyog	721,575,000	-	-	479,762,000	1,201,337,000	480,534,800	480,534,800	240,267,400
139	Mojogedang	Gentungan	721,575,000	-	-	493,866,000	1,215,441,000	486,176,400	486,176,400	243,088,200
140	Mojogedang	Pendem	641,574,000	-	288,153,000	408,110,000	1,337,837,000	535,134,800	535,134,800	267,567,400
141	Mojogedang	Pereng	721,575,000	-	-	295,175,000	1,016,750,000	406,700,000	406,700,000	203,350,000
142	Mojogedang	Munggur	721,575,000	-	288,153,000	279,765,000	1,289,493,000	773,695,800	515,797,200	Desa Mandiri 60% dan 40 %
143	Mojogedang	Kedungjeruk	721,575,000	-	-	393,954,000	1,115,529,000	446,211,600	446,211,600	223,105,800
144	Kerjo	Kuto	721,575,000	-	-	338,447,000	1,060,022,000	424,008,800	424,008,800	212,004,400
145	Kerjo	Tamansari	641,574,000	-	-	357,889,000	999,463,000	399,785,200	399,785,200	199,892,600
146	Kerjo	Ganten	641,574,000	-	-	174,744,000	816,318,000	326,527,200	326,527,200	163,263,600
147	Kerjo	Gempolan	641,574,000	-	-	405,027,000	1,046,601,000	418,640,400	418,640,400	209,320,200
148	Kerjo	Plosorejo	641,574,000	-	-	459,548,000	1,101,122,000	440,448,800	440,448,800	220,224,400
149	Kerjo	Karangrejo	721,575,000	-	-	366,317,000	1,087,892,000	435,156,800	435,156,800	217,578,400
150	Kerjo	Kwadungan	641,574,000	-	-	201,551,000	843,125,000	337,250,000	337,250,000	168,625,000
151	Kerjo	Botok	641,574,000	-	288,153,000	200,588,000	1,130,315,000	452,126,000	452,126,000	226,063,000
152	Kerjo	Sumberejo	641,574,000	-	-	223,867,000	865,441,000	346,176,400	346,176,400	173,088,200
153	Kerjo	Tawang Sari	641,574,000	-	-	359,206,000	1,000,780,000	400,312,000	400,312,000	200,156,000
154	Jenawi	Gumeng	641,574,000	-	-	566,453,000	1,208,027,000	483,210,800	483,210,800	241,605,400
155	Jenawi	Anggrasmanis	641,574,000	171,591,000	-	507,185,000	1,320,350,000	528,140,000	528,140,000	264,070,000
156	Jenawi	Jenawi	641,574,000	-	-	339,951,000	981,525,000	392,610,000	392,610,000	196,305,000
157	Jenawi	Trengguli	641,574,000	-	-	427,296,000	1,068,870,000	427,548,000	427,548,000	213,774,000
158	Jenawi	Sidomukti	641,574,000	-	-	409,536,000	1,051,110,000	420,444,000	420,444,000	210,222,000
159	Jenawi	Balong	641,574,000	-	-	236,964,000	878,538,000	351,415,200	351,415,200	175,707,600
160	Jenawi	Seloromo	641,574,000	-	288,153,000	286,643,000	1,216,370,000	486,548,000	486,548,000	243,274,000
161	Jenawi	Menjing	641,574,000	-	-	240,431,000	882,005,000	352,802,000	352,802,000	176,401,000
162	Jenawi	Lempong	641,574,000	171,591,000	-	432,448,000	1,245,613,000	498,245,200	498,245,200	249,122,600
<b>Total</b>			<b>110,015,064,000</b>	<b>686,364,000</b>	<b>4,610,448,000</b>	<b>54,002,184,000</b>	<b>169,314,064,000</b>	<b>69,093,906,000</b>	<b>67,725,625,600</b>	<b>32,494,532,400</b>

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

